



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA
TOGUBANG DAN DESA TEGAR PRIYAH KECAMATAN GEGER
KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

MAULIDIA HIDAYATI

NPM 218.01.09.1.141



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMNISTRASI PUBLIK
MALANG
2023**

RINGKASAN

Maulidia Hidayati, 2023, NPM 21801091141, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi. **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Togubang Dan Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.** Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Yaqub Cikusin. M.Si, Dosen Pembimbing II : Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah salah satu program bantuan yang bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan PKH perlu di evaluasi secara berkala karena ditemui beberapa kesenjangan antara masih terdapat kendala dalam ketidak sinkronan data kependudukan, lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sulit dijangkau dan ketidak tersediaan sarana dan prasarana dalam P2K2. Maka dari itu, hal ini dibutuhkan adanya perbaikan implementasi Program Keluarga Harapan untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn (1975:462) dalam Tachjan, 2006:21 yang dikaji melalui enam indikator yakni : Ukuran (Standar) dan Tujuan Kebijakan , Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait, Sikap Pelaksana dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kemudian untuk mengukur efektivitas implemetasi program PKH Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan peneliti menggunakan 4 indikator teori efektivitas dari Budiani, 2007:53 yakni : Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya, data penelitian di analisis dengan teknik dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan sudah berjalan, 2) terdapat faktor pendorong berupa sumber finansial karakteristik peran pendamping dan lingkung sosial ekonomi, sedangkan faktor penghambat di dapatkan pada ketidak sinkronan data penduduk serta lokasi penerima PKH yang sulit di jangkau, 3) efektivitas Program Keluarga Harapan PKH tidak serta merta mampu mengentaskan kemiskinan 100%, namun secara perlahan PKH mampu menurunkan jumlah penerima PKH tahun 2021 terakhir yang mencapai 65.000an penerima PKH menjadi 41.000an penerima PKH.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

SUMMARY

Maulidia Hidayati, 2023, NPM 21801091141, *Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences. Implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) Policy to Overcome Poverty in Togubang and Tegar Priyah Villages, Geger District, Bangkalan Regency. Supervisor I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin. M.Si, Supervisor II: Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc*

Program Keluarga Harapan (PKH) is an aid program that aims to help reduce poverty by improving the quality of human resources in very poor community groups in Togubang Village and Tegar Priyah Village, Geger District, Bangkalan Regency. However, in reality, the implementation of PKH needs to be evaluated periodically because several gaps have been found, including obstacles in the synchronization of population data, the location of Keluarga Penerima Manfaat (KPM) which is difficult to reach and the unavailability of facilities and infrastructure in P2K2. Therefore, it is necessary to improve the implementation of the Program Keluarga Harapan to overcome poverty in Togubang Village and Tegar Priyah Village, Geger District, Bangkalan Regency.

This research uses the policy implementation model theory of Van Mater and Van Horn (1975:462) in Tachjan, 2006:21 which is examined through six indicators, namely: Measures (Standards) and Policy Objectives, Resources, Characteristics of implementing agents, Communication between organizations related, the attitude of the implementer and the social, economic and political environment. Then, to measure the effectiveness of the implementation of the PKH program in Togubang Village and Tegar Priyah Village, Geger District, Bangkalan Regency, researchers used 4 indicators theories of effectiveness from Budiani, 2007:5, namely: Target Accuracy, Program Socialization, Program Objectives and Program Monitoring. This research uses qualitative research with a descriptive approach. Next, the research data was analyzed using techniques from Miles and Huberman which consisted of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that 1) the Program Keluarga Harapan (PKH) to overcome poverty in Togubang Village and Tegar Priyah Village, Geger District, Bangkalan Regency is already running, 2) there are driving factors in the form of financial resources, characteristics of the companion's role and socio-economic environment, while inhibiting factors are find out about the synchronization of population data and the location of PKH recipients who are difficult to reach, 3) the effectiveness of the PKH is not immediately able to eradicate poverty 100%, but slowly PKH is able to reduce the number of PKH recipients in 2021 which last reached 65,000 PKH recipients to 41,000 PKH recipients.

Keywords: *Policy Implementation, Program Keluarga Harapan (PKH), Effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Berbagai kondisi yang mendiskripsikan masyarakat miskin seperti masih banyaknya anak-anak menderita kekurangan gizi, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan masih kurangnya akses infrastruktur maupun pelayanan publik. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar di seluruh wilayah indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat nelayan ataupun daerah-daerah kumuh di perkotaan. Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tigginya disparitas antar daerah dan golongan masyarakat, akibat tidak

meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun tingkat kemiskinan di Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunannya, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatikan tiap hari tiap tahunnya.

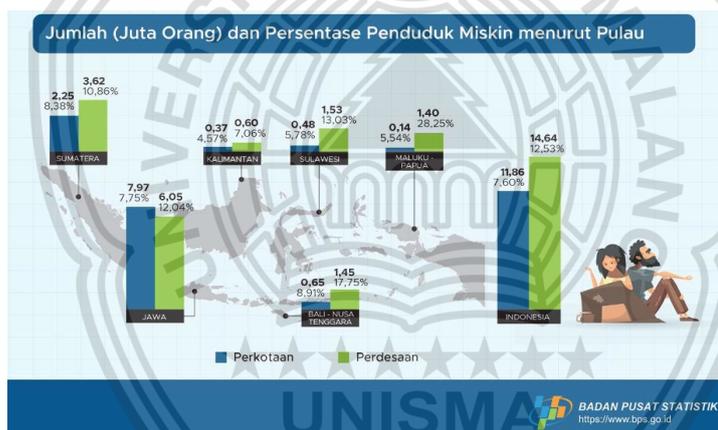
Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kualitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (Nurske, 1953) dan telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia (Sumanta, 2005).

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah berfokus pada : Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin,

peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar, pangan, dan gizi), peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta perkembangan UMKM, serta perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program keluarga Harapan (PKH). Beberapa proyek pemberdayaan masyarakat antara lain P2KP, PPK, CERD, SPADA, PEMP, WSSLIC, dan P2MPD.

Permasalahan kemiskinan pada tahun 2021 di Indonesia bisa dikatakan tinggi seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Jumlah dan Presentasi Kemiskinan di Indonesia

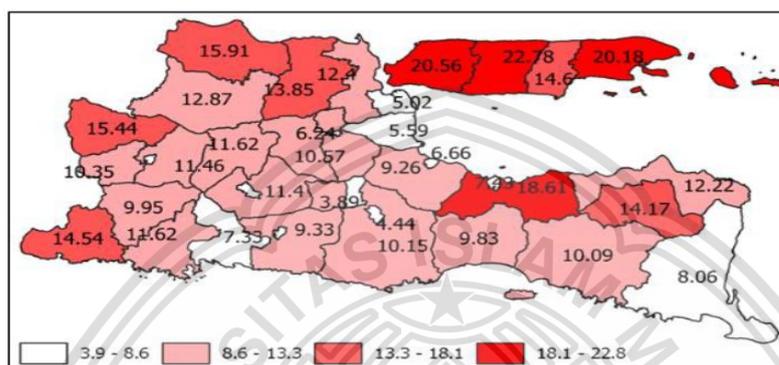


Sumber: <https://www.bps.go.id/website/images/Profil-Kemiskinan-Indonesia-September-2021-ind.jpg>

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui angka kemiskinan di Indonesia yang menurut Pulau secara umumnya di perkotaan mencapai 11, 86 atau 7,60% dan di pedesaan 14,64 atau 12,53%. Kemudian dari beberapa pulau di Indonesia Pulau Jawa yang paling tinggi tingkat kemiskinannya yaitu mencapai 7,97 atau 7,75% di perkotaan dan 6,05 atau 12,04% di pedesaan. Sedangkan di pulau jawa terdiri dari tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Angka kemiskinan

provinsi jawa barat mencapai 7,97%, provinsi jawa tengah mencapai 11,25%, dan provinsi jawa timur mencapai 10,59% (jatim.bps.go.id). Peneliti mengambil di provinsi jawa timur lebih tepatnya pada kabupaten Bangkalan yang mana angka kemiskinannya mencapai 219,97 atau 21,57%.

Gambar 1.2 Jumlah Kemiskinan Di Bangkalan



Sumber : Muhammad Rifqi Maulana Firdaus, Faktor Kemiskinan di Bangkalan Menggunakan Analisis PCA, Jurnal Ilmiah Komputasi dan Statistika, (Februari, 2022) <http://jikostik.org/index.php/jikostik/article/view/13>

Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 sebesar 20,56 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 204.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Bangkalan tercatat sebesar 12,44 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 123.490 jiwa. Angka tersebut menggolongkan Kabupaten Bangkalan berada pada kelompok dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan bisa mengoptimalkan programnya dalam menanggulangi persoalan kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan kemiskinan tersebut, Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi kantong kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Beberapa program perlindungan sosial yang diambil oleh Pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pembukaan UUD 1945 untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek, maka pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk program-program bantuan sosial. Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah. Dari sekian banyaknya program bantuan sosial peneliti memilih Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penelitian ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sejak tahun 2007. Program ini diberikan melalui bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program Perlindungan Sosial ini diberikan melalui konsep *Conditional Cash Transfers* (CCT) dan dianggap cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi berbagai negara, terutama masalah kemiskinan kronis (<https://pkh.kemsos.go.id>, 2019)

Sukardi (2022) dari koordinator PKH Dinas Sosial Bangkalan menyatakan bahwa :

“PKH singkatan dari Program Keluarga Harapan yakni program bantuan bersyarat yang menasar berbagai kategori masyarakat miskin atau rentan miskin. Syarat dapat bantuan BPNT maupun

PKH, masyarakat miskin atau rentan miskin harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”

Seperti disebutkan di atas, PKH menasar berbagai kategori masyarakat mulai dari ibu hamil, anak usia 0-6 tahun, lansia, penyandang disabilitas, siswa SD, SMP, dan SMA. 7 kategori penerima PKH tersebut mendapatkan bantuan berbeda yang dicairkan empat tahap dalam satu tahun yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober. Sukardi (2022) dari koordinator PKH Dinas Sosial Bangkalan menyatakan bahwa:

“Teknik yang digunakan untuk menyalurkan program keluarga harapan distribusi kartu pkh dari tahun 2017 melalui kartu KPM, lalu ada pengembangan yang di alihkan ke BRI link dalam 3 bulan sekali, mekanisme mengikuti SOP bank (IWC) yang paham penerima PKH yang harus berhadapan langsung dengan penerima, dari mekanisme tersebut itu masih seringkali ada penyelewengan karena POS versi lama tidak dilengkapi dengan dokumen SPG yang memadai karena dengan KTP sudah bisa mengambil bantuan PKH sedangkan POS yang baru mengikuti SOP Bank yang berlaku lebih mengurangi kecurangan karena di SPG POS yang terbaru terserbet harus memfoto penerima bantuan tersebut saat bantuan itu cair jadi Pos versi terbaru bisa membuktikan bahwa bantuan pkh tersebut sudah di terima oleh yang bersangkutan melalui foto tersebut. Penerapannya melalui bank lalu dari bank mentransfer ke rekening penerima masing-masing setiap 3 bulan sekali. Dari POS versi terbaru lebih menekan kecurangan dari oknum-oknum yang curang. Dari BPNT penerima PKH di Kecamatan Geger paling banyak di Kabupaten Bangkalan”

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dalam pasal 6 ketentuan dimaksud, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak mendapatkan: a) Bantuan Sosial PKH; b) pendampingan PKH; c) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan d) program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan

pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Keluarga penerima PKH harus memenuhi kriteria komponen yang terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Komponen pendidikan meliputi: a) anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; b) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; c) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Komponen kesejahteraan meliputi: a) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan b) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Bantuan diberikan dalam bentuk uang melalui rekening berupa bantuan tetap dan bantuan sesuai komponen dalam keluarga. Ketentuan pemberian bantuan komponen tersebut maksimal untuk 4 (empat) orang dalam satu keluarga.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara - negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis.

Tujuan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengertian penyaluran bantuan dan Program Keluarga Harapan (PKH), maka penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah proses pendataan, *survey*, dan pencairan dana atau penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke masyarakat agar dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut diterima oleh penerima yang benar-benar membutuhkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut sehingga dana bantuan tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah.

Teknik yang digunakan untuk menyalurkan program keluarga harapan distribusi kartu pkh dari tahun 2017 melalui kartu KPM, lalu ada pengembangan yg di alihkan ke BRI link dalam 3 bulan sekali, mekanisme mengikuti SOP bank (IWC) yang paham penerima PKH yang harus berhadapan langsung dengan penerima, dari mekanisme tersebut itu masih seringkali ada penyelewengan karena POS versi lama tidak dilengkapi dengan dokumen SPG yang memadai karena dengan KTP sudah bisa mengambil bantuan PKH sedangkan POS yang baru mengikuti SOP Bank yang berlaku lebih mengurangi kecurangan karena di SPG POS yang terbaru tersesebut harus memfoto penerima bantuan tersebut saat bantuan itu cair jadi Pos versi

terbaru bisa membuktikan bahwa bantuan pkh tersebut sudah di terima oleh yang bersangkutan melalui foto tersebut. Penerapannya melalui bank lalu dari bank mentransfer ke rekening penerima masing-masing setiap 3 bulan sekali (Sukardi : 2022). Dari POS versi terbaru lebih menekan kecurangan dari oknum-oknum yang curang. Dari BPNT penerima PKH di Kecamatan Geger paling banyak di Kabupaten Bangkalan (Sukardi 2022).

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti menjatuhkan pilihan di Desa Togubeng Kecamatan Geger dengan alasan bahwa berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Desa Togubang merupakan desa paling banyak menerima bantuan PKH di Kecamatan Geger. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel .1.1 Jumlah Penerima Bantuan PKH Kecamatan Geger

No.	Nama Desa	Jumlah Penerima PKH
1.	Togubang	635
2.	Lerpak	612
3.	Kampak	583
4.	Katol Barat	562
5.	Geger	560
6.	Banyoneng Laok	492
7.	Banyoneng Dajah	394
8.	Campor	361
9.	Kombangan	333
10.	Dabung	326
11.	Kopol	291
12.	Batobella	282
13.	Tegar Priyah	161

Sumber : Dinas Sosial Bangkalan 2021

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Desa Togubang merupakan desa dengan jumlah tertinggi penerima bantuan PKH di Kecamatan Geger yang berjumlah 635

KPM dan Desa Tegar Priyah dengan penerima PKH paling sedikit penerima bantuan PKH di kecamatan Geger yang berjumlah 161 KPM.

Kasus PKH diakui perlu banyak pembenahan dan perbaikan. Sehingga Dinas Sosial akan mengkaji dan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai permasalahan PKH. Peran Dinas Sosial sosialisasi dalam penggunaan dan tujuan dari bantuan PKH masih belum dikatakan maksimal. Menurut Fatoni (2022) koordinator PKH Desa Togubang.

“Problematika yang terjadi dikarenakan konteks kemiskinan di Desa Togubang yaitu keluarga penerima manfaat (KPM) lebih dominan tidak menggunakan bantuan PKH ini sesuai kegunaannya, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga penerima bantuan PKH pada setiap tahunnya tidak berkurang”

Hal tersebut dituturkan oleh kordinator PKH itu sendiri setelah peneliti melakukan penelitian. Koordinator PKH sendiri merupakan aktor penting dalam mensukseskan program PKH. Kordinator PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Sehingga dari situlah peneliti dapat mengulik problematika yang terjadi dalam pelaksanaan PKH itu sendiri.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan PKH perlu di evaluasi secara berkala karena ditemui beberapa kesenjangan antara pelaksanaannya. Temuan-temuan tersebut pada kenyataannya berbeda dengan kondisi di Kabupaten Bangkalan. Dalam kenyataan menurut Toha (2022) koordinator PKH di Desa Tegar Priyah menjelaskan bahwa :

“Pada Desa tersebut yang menjadi penghambat atas kesuksesan dalam implementasi penerimaan PKH yaitu data penerima yang

terbilang tidak *up to date*. Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa tidak pernah memperbarui data warga penerima PKH kepada Dinas Sosial. Padahal apabila kita menelaah lebih dalam, program ini pada dasarnya dikhususkan kepada masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang sangat miskin. Tetapi realitanya, masyarakat Desa Tegar Priyah mempersoalkan bahwa penerima PKH dari tahun ke tahun hanya didapatkan oleh keluarga yang sama, padahal masih banyak keluarga yang harusnya mendapatkan fasilitas PKH itu sendiri namun realitanya malah tidak terdaftar sebagai calon maupun penerima program PKH tersebut. Sehingga Sebagian masyarakat melaporkan kegagalan tersebut kepada kordinator PKH yang memiliki wewenang dalam permasalahan ini”

Dijelaskan oleh koordinator PKH bahwa data penerima bantuan PKH di desa Tegar Priyah tidak ada pembaruan data, sehingga penerima PKH tidak sesuai dengan sasaran PKH.

Melihat penjelasan diatas celah atau gap penelitian yang ada dalam penelitian yang di dipeoleh peneliti untuk mengetahui sebuah kesenjangan yang terjadi pada peorlehan data penelitian ialah dimana dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Togubang Dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan masih terdapat kendala dalam ketidak sinkronan data kependudukan yang dilapirkan dari pusat dengan data kependudukan dari desa. Sehingga berdampak pada ketidak tepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan, kemudian, lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana daerah jangkauannya membutuhkan waktu tempuh yang lama yaitu sekitar 1 jam perjalanan di tambah lagi dengan medan jalan yang rusak dan yang terakhir ialah ketidak tersediaan sarana dan prasarana dalam P2K2. Mengingat PKH merupakan program kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka diperlukan mengkaji secara lebih lanjut mengenai implementasi program tersebut yang telah dijalankan selama ini di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah

Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Sehingga berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema tersebut dan dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Togubang Dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ?
3. Apakah sudah efektif atau tidak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemerataan dan peningkatan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaiman implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi Kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk Menganalisis efektifitas pada Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wacana bagi peneliti maupun masyarakat pembelajar pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya tentang implementasi program keluarga harapan untuk menanggulangi kemiskinan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk lebih memahami tentang implementasi program keluarga harapan untuk menanggulangi kemiskinan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepala dinas sosial, dan koordinator pkh untuk menanggulangi kemiskinan.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi program keluarga harapan untuk menanggulangi kemiskinan dalam perspektif yang berbeda. Sehingga, terdapat berbagai pengayaan wacana sekaligus hasil temuan di lapangan yang mampu membangun sebuah teori baru.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Mereview hasil-hasil penelitian sebelumnya, memaparkan perspektif teoritik atau fenomena yang diangkat dalam penelitian, dan kerangka pemikiran dari konsep-konsep dalam tinjauan pustaka.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, teknis analisis data, dan keabsahan data.

BAB 4 GAMBARAN SETTING PENELITIAN

Menjelaskan mengenai kondisi geografis tempat peneliti, potret kehidupan sosial ekonomi, dan sub wilayah penelitian.

BAB 5 TEMUAN HASIL PENELITIAN

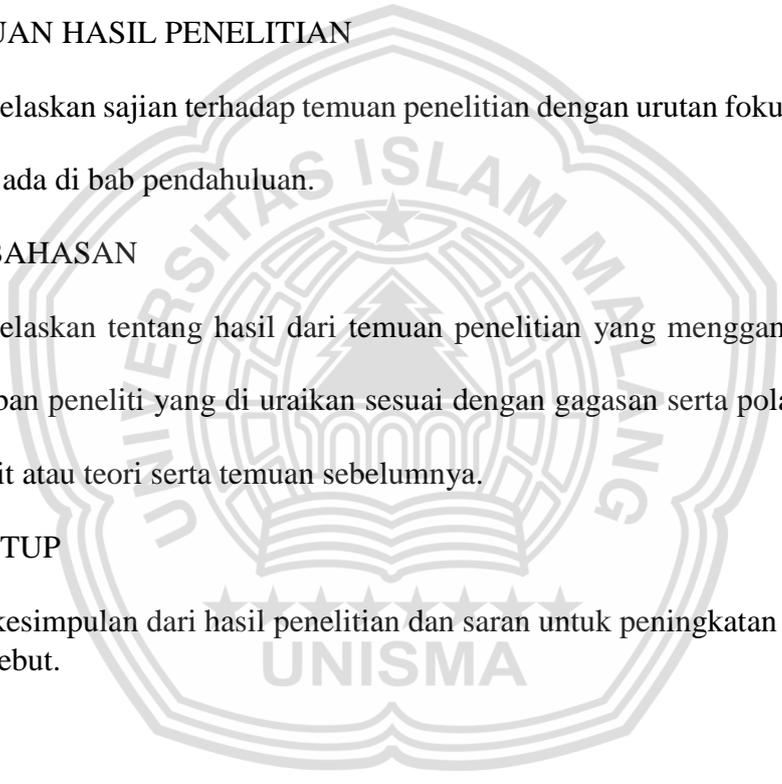
Menjelaskan sajian terhadap temuan penelitian dengan urutan fokus kajian yang ada di bab pendahuluan.

BAB 6 PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil dari temuan penelitian yang menggambarkan jawaban peneliti yang di uraikan sesuai dengan gagasan serta pola – pola terkait atau teori serta temuan sebelumnya.

BAB 7 PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk peningkatan kebijakan tersebut.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pemahasan yang dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan sudah berjalan dengan baik karena telah memenuhi variabel yang diusung oleh indikator – indikator yang peneliti gunakan dalam meneliti implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan yang dikaji melalui teori model implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn (Tadjhan,2006), namun ada satu indikator yang belum terckupi sehingga menimbulkan ketimpangan implementasi kebijakaan yaitu pada indikator sumber daya berikut ulasanya :

1. Ukuran (Standar) dan Tujuan Kebijakan

Ukuran (standar) kebijakan yang dimiliki implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan sudah cukup jelas dimana ukuran kebijakan tersebut dituangkan dalam Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022 yang dicangkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia.

2. Sumber daya

Sumber daya dimiliki implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan belum terlaksana dengan baik dimana dalam jumlah pendamping PKH tidak serta merta memiliki sumber daya yang imbang dimana jumlah pendamping PKH Desa Togubang berjumlah 2 sedangkan pendamping Desa Tegar Priyah hanya berjumlah 1 orang dengan masing masing desa akan dibantu oleh staff desa, dan pengawas PKH. Perbedaan ini akan menjadikan ketimpangan pekerjaan kurang maksimal untuk Desa Tegar Priyah.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan telah memenuhi poin teori karakteristik agen pelaksana Van Meter dan Van Horn untuk menentukan kemampuan agen pelaksananya melalui tahap seleksi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.

4. Komunikasi antar Organisasi Aktivitas Pelaksana

Jalinan komunikasi yang cukup bagus juga ditampakkan melalui merambah luasnya jalinan relasi antar Organisasi perangkat daerah lain seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan yang melakukan kegiatan koordinasi p2k2 dengan mengusung pertemuan kelompok untuk mengedukasi masyarakat serta memberikan arahan mengenai kehidupan sosial yang turut serta melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dalam menyalurkan serta mengedukasi masyarakat mengenai

stunting bahwa pelaksanaan komunikasi. Kemudian dari segi pendampingan juga telah dikategorikan memiliki kecukupan indikator yang mana para pendamping melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan perdusun dari KPM sehingga memudahkan pemahaman informasi melalui sosialisasi yang dilakukan 2 kali dalam satu bulan.

5. Sikap Pelaksana

Kedua desa tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksanaan mereka dalam melakukan pendampingan PKH berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dimana dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan memuat tentang tupoksi pendamping pkh yang terletak pada Bagian Ketujuh Pasal 49 tentang Pendampingan PKH, kemudian juga memuat tentang hak dan kewajiban peserta PKH yang ditulis pada BAB II Pasal 6 tentang Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mengulik bagaimana respon kelompok eksternal dalam menerima program bantuan PKH, dalam hal ini respon masyarakat terhadap implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan cukup baik karena dianggap mampu membantu perekonomian mereka.

Selain itu dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan juga terdapat faktor pendukung dan penghambat diantaranya ialah :

1. Faktor pendukung : Sumber daya finansial yang didapatkan masyarakat dari program bantuan PKH itu sendiri sehingga jika ditinjau dari segi finansial PKH ini dapat memantu menutupi kebutuhan perekonomian KPM , adanya karakteristik peran pendamping di dalam pelaksanaan program tersebut maka akan dapat membantu kelancaran dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan adanya profesionalisme, sikap telaten dan sabar, ramah serta memiliki perhatian yang baik kepada masyarakat penerima manfaat dan lingkungan sosial ekonomi yang memiliki perubahan yang signifikan.
2. Faktor Penghambat : ketidak sinkronan data kependudukan yang dilaporkan dari pusat dengan data kependudukan dari desa. Sehingga berdampak pada ketidak tepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan, kemudian, lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana daerah jangkauannya membutuhkan waktu tempuh yang lama yaitu sekitar 1 jam perjalanandi tambah lagi dengan medan jalan yang rusak dan yang terakhir ialah ketidak tersediaan sarana dan prasarana dalam P2K2.

Dari pemaparan diatas peneliti juga menelaah keefektivan Implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan yang diukur menggunakan 4 indikator dari dari (Budiani,2007:53) yakni ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan

dan pemantauan program. Yang mana dari keempat indikator tersebut dapat dikatakan belum terpenuhi sehingga didapatkan bahwa PKH tidak serta merta mampu mengentaskan kemiskinan 100% karena Kabupaten Bangkalan sendiri masih tercatat sebagai peringkat kedua kabupaten yang memiliki kemiskinan tinggi, namun secara perlahan PKH mampu menurunkan jumlah penerima PKH tahun 2021 terakhir yang mencapai 65.000an penerima PKH menjadi 41.000an penerima PKH.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi serta masukan baik untuk peningkatan pengayaan teori maupun pengangkatan permasalahan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan guna mendukung pelaksanaan program ialah sebagai berikut :

1. Perlu adanya evaluasi berkala dari pemaparan data penerima bantuan PKH untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan pertriwulan atau 3 bulan yang dilakukan oleh Pendamping PKH Desa Tegar Priyah dan Desa Togubang hingga Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan agar validitas data dan sinkronitas data tetap terjaga.
2. Perlu adanya *call center* pada semua perangkat daerah yang terlibat untuk menerima aduan graduasi sehingga terjadi pembaharuan data – data penerima bantuan PKH untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

3. Perlu adanya perbaikan fasilitas publik khususnya jalan raya Kabupaten Bangkalan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar memudahkan kinerja para Pendamping PKH Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dalam menjangkau sasaran aau penerima bantuan PKH untuk melakukan pendampingan.
4. Perlu disediakannya sarana dan prasarana sosialisasi P2K2 seperti penyediaan layar proyektor dan penyediaan kursi sebagai bentuk sarana pendukung dalam memudahkan penyampaian sosialisasi kepada para penerima bantuan PKH.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2008). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2003). *Prosedur penelitian dan Studi Kasus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, & Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Effendy. (1993). *Human Relations dan Publik Relations* . Bandung: Mandar Maju.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif (dasar - dasar dan aplikasi)*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3).
- Handoko, T. H. (1998). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPPE.
- Hermawati, I., Dayanayati, K., Rusmiyati, C., Hikmawati, E., Andari, S., Winarno, E., . . . Molasy, H. D. (2015). *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan Cetakan 1*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Khosman, A., Dharmawan, A. H., Saharuddin, Alifiasari, Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jawa Tengah: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). *Reliability and Validity Qualitative Research Vol.1* . California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Resda Karya.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurske, R. (1953). *Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicios Cycle of Poverty)* .
- Royat, S. (2015). *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: MenKo Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Siagian. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2012). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakaeta: Rineka Cipta.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method Edisi Ke dua*. Depok: Rajawali Pers.

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurakhman. (Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan). 2014. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tunggal, W. A. (2002). *Audit Manajemen Kontenporer, Edisi revisi*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, H. (1996). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Jurnal dan Skripsi

- Arini, & Mustika, M. S. (2015). Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali Tahun 2007-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.4 No.3*, 1141-1163.
- Budiani, Ni Wayan.(2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No.1*
- Firdaus, M. R. (2022). Faktor Kemiskinan di Bangkalan Menggunakan Analisis PCA . *Jurnal Ilmiah Komputasi dan Statistika*.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Vol. 1 No. 1*, 140-162.
- Kadji, Y. (2012). Teori Motivasi. *Jurnal Inovasi Vol. 9 No. 1*.
- Khoif, K. I. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 709-714.
- Pratama, M. H. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan Penguji Kendaraan Bermotor). *Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Prichatin, A. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kesegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas) [Skripsi]*. Purwokerto: Repositori IAIN Purwokerto.

- Purwanto, S. A., Sumartono, & Makmur, M. (2018). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Putri, N. A., & Purnaweni, H. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bojenegoro. *Journal Of Public Policy and Management Review*.
- Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Leksbang Mediatama.
- Sasmito, C. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *Journal Of Public Sector Innovations Vol.3 No. 2*.
- Setiani, T. (2014). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya [Skripsi]*. Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- Sumanta, J. (2005). *Fenomena Lingkaran Kemiskinan di Indonesia : Analisis Ekometri Regional*. Jakarta: Galia.
- Virgoreta, D. A. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)*. Malang: Repository Universitas Brawijaya.

Sumber Internet

- Badan Pusat Statistika. (2022, Januasri 17). *Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2021*. Diambil kembali dari Jumlah (Juta Orang) dan Presentase Penduduk Miskin: <https://www.bps.go.id/website/images/Profil-Kemiskinan-Indonesia-September-2021-ind.jpg> (Diakses pada 09 September 2023)
- Bangkalan Tourism. (2019). *Bangkalan Map*. Diambil kembali dari Bangkalan Madura Map: <https://www.eastjava.com/tourism/bangkalan/map.html> (diakses pada 08 Agustus 2023)
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Program Keluarga Harapan*. Diambil kembali dari <https://pkh.kemensos.go.id> (diakses pada 08 Agustus 2023)
- Pemerintah Kabupaten Bangkalan. (2023). *Geografis Bangkalan*. Diambil kembali dari Bangkalan: bangkalankec.bangkalankab.go.id (diakses pada 08 Agustus 2023)

Perundang - Undangan

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Surat Keputusan Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/BS.02.01/01/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020.